

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Amerika Serikat merupakan salah satu negara republik yang paling tua di dunia. Sejak pendiriannya, Amerika mengalami berbagai perubahan baik itu dalam segi kehidupan internal maupun segi kehidupan eksternalnya. Dalam kehidupan internal, Amerika mengalami berbagai perkembangan baik itu dari segi politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Demikian pula dengan kehidupan eksternalnya yaitu yang berkaitan dengan interaksinya dengan negara-negara lain.

Sepanjang kehadirannya dalam dunia internasional, kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh Amerika Serikat yang berkenaan dengan politik luar negeri selalu mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Salah satunya yaitu adanya politik isolasionis yang diputuskan oleh para pembuat keputusan Amerika Serikat pada awal pendiriannya. Politik Isolasionis yang dianut oleh bangsa Amerika Serikat pada saat itu membuat Amerika Serikat sedikit sekali melakukan interaksi dengan dunia luar, atau bahkan dapat diambil gambaran bahwa Amerika Serikat berupaya untuk tidak berurusan dengan dunia luar.

Selama beberapa abad, Amerika Serikat menganut politik isolasionis pada politik luar negerinya, namun keterlibatan Amerika Serikat yang secara tidak langsung pada Perang Dunia I membuat para pemikir Amerika Serikat meninjau kembali kebijakan yang diambilnya. Namun, karena politik Isolasionis

Amerika Serikat, maka politik isolasionis tetap dipegang teguh oleh Amerika Serikat. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada kebijakan yang dikeluarkannya. Pada masa isolasionis ini, kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat sangat dibatasi oleh oleh Kongres, sehingga tidak mudah bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan kecuali jika telah disetujui oleh Kongres.

Keterlibatan Amerika Serikat secara langsung pada Perang Dunia II, membuat para pemimpin Amerika Serikat secara perlahan merubah politik luar negeri yang dianutnya ke arah yang lebih agresif, bahkan sangat berbeda dengan sebelumnya. Pada Era Perang Dingin, keagresifan Amerika Serikat, tampak lebih nyata lagi, hal ini dapat dilihat dengan dijadikannya Amerika Serikat sebagai pimpinan dari blok barat yang bermusuhan dengan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Sepanjang Perang Dingin, proses pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat relatif tidak tergantung pada Kongres. Konsensus Perang Dingin membuat pemerintah Amerika Serikat dapat dengan leluasa merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negeri yang diambilnya, tanpa harus memperhatikan tuntutan dan dukungan dari Kongres. Bahkan pada masa ini, disebut-sebut sebagai masa kekaisaran presiden.

Berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet, tetap membuat kekuasaan badan eksekutif menjadi tinggi. Namun, dengan adanya kekalahan Amerika Serikat pada Perang Vietnam dan terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat, membuat masyarakat Amerika Serikat meninjau kembali kebijakan atas kekuasaan presiden yang dianggap terlalu tinggi.

Akhirnya setelah mengalami berbagai guncangan, pemerintah Amerika Serikat menarik kembali kekuasaan presiden yang begitu tinggi. Hal itu terlihat pada masa pemerintahan presiden Bill Clinton. Adanya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan urusan domestik dibanding urusan luar negeri, membuat pemerintah Amerika Serikat sempat melupakan urusan luar negeri, karena terlalu fokus dalam urusan domestik. Namun, setelah beberapa tahun kepemimpinannya, presiden Bill Clinton akhirnya mengeluarkan haluan dasar kebijakan luar negerinya.

Adanya perubahan lingkungan domestik yang dihadapi presiden Bill Clinton, mempengaruhi berbagai kebijakan yang dikeluarkannya. Perbedaan menyolok yang timbul dengan berakhirnya Perang Dingin adalah dengan semakin kaburnya batas antara isu-isu domestik dan isu-isu internasional. Dengan hilangnya ancaman komunis, isu-isu demokrasi, lingkungan, hak-hak buruh, dan hak asasi manusia mencuat menjadi isu-isu *intermestic*, yaitu isu-isu internasional yang berinteraksi dengan kuat dengan isu-isu domestik. Isu tentang demokrasi, lingkungan dan hak asasi manusia merupakan isu-isu yang termasuk ke dalam isu *intermestic*. Clinton, yang sejak masa kampanyenya

juga telah menjadikan isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia sebagai isu kampanyenya, tentu saja memandang perubahan yang terjadi sebagai suatu keuntungan.

Dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya, pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini presiden Bill Clinton selalu memperhatikan tuntutan dan dukungan yang datang baik itu dari Kongres maupun dari Partai Politik yang ada di Amerika Serikat. Dalam mengeluarkan setiap kebijakan, di butuhkan proses yang panjang, dimana proses tersebut memerlukan tahap- tahap dan peran dari setiap elemen yang terkait. Dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri mengenai penyebaran demokrasi di kawasan Asia Pasifik, pemerintah Amerika Serikat di bawah pemerintahan presiden Bill Clinton tentu saja membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama dukungan dari kaum elite politik sebagai akibat dari adanya pembatasan kekuasaan presiden di akhir era paska Perang Dingin.

Dalam masa pertama pemerintahannya, Presiden Bill Clinton yang berasal dari Partai Demokrat selalu mendapat dukungan dari Kongres yang merupakan salah satu elite politik yang emiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. hal ini disebabkan karena pada saat itu Kongres didominasi oleh anggota yang berasal dari Partai Demokrat. Sebagaimana yang diketahui, Partai Demokrat merupakan partai yang sangat peduli terhadap nilai-nilai liberal termasuk masalah demokrasi dan hak asasi manusia. Sehingga setiap kebijakan yang di keluarkannya yang berkenaan dengan demokrasi di dunia termasuk di kawasan Asia Pasifik selalu

mendapat respon positif dari Kongres yang didominasi oleh Partai Demokrat. Dengan keuntungan tersebut, maka presiden Bill Clinton dapat dengan mudah mengeluarkan dan menjalankan kebijakan luar negeri yang diambilnya yang berkaitan dengan penyebaran demokrasi. Bahkan dengan jelas, Clinton mengeluarkan pernyataan bahwa fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Asia Pasifik adalah masalah demokrasi. Situasi yang kondusif yang dialami Amerika Serikat pada era presiden Bill Clinton dalam mengeluarkan kebijakan tentang demokrasi di kawasan Asia Pasifik membuat presiden Bill Clinton dengan mudah mengeluarkan berbagai kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan perluasan demokrasi.

Demikian pula pada saat Kongres tidak didominasi oleh Partai Demokrat, kebijakan Amerika Serikat tentang demokrasi terus dilahirkan bahkan termasuk ke dalam pilar utama kehadiran Amerika Serikat di Asia Pasifik. Hal tersebut terjadi karena adanya dukungan dari elite politik yang berupa Partai Demokrat melalui proses yang panjang yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan tersebut, dilakukan oleh presiden dan unsur-unsur lain yang terkait. Dimana presiden secara penuh tetap dipengaruhi oleh Partai Politik yang dianutnya. Presiden dalam hal ini merupakan wakil yang ditunjuk oleh sebuah Partai Politik untuk mewujudkan cita-cita partainya, sehingga presiden memiliki kewajiban moral untuk meraih cita-cita partai yang dianutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Canrong, Jin, *The United States Global Strategy in The Post War and its Implications for China- United States: a China Perspektive*, Journal of Contemporary China, 2001
- Cipto, Bambang, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkaran, Yogyakarta, 2003
- Cipto, Bambang, *Tekanan Amerika terhadap Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Cline, Dave, *Artikel: Clinton Visit Vietnam*
- Curtis, Gerald L, *The United States, Japan, and Asia*, WW. Norton and Company, New York, 1994
- Feffer, John, *Artikel: Foreign Policy in Focus: U.S- North Korea Relations*, Mei 1999
- Glaser, Bonnie S, *Artikel: urrent Trends in Cnines Attitudes Toward the United States*
- Goldstein, Avery, *Artikel: U.S Policy Towards Asia*, 17 April 2001
- Goldstein, Avery, *Artikel: U.S Policy Toward China: Try for The Best, Prepare for The Worst*, 30 Maret 2001
- Huckshorn, Robert J, *Political Parties in America*, Wadsworth Inc, California, 1984
- Jatmika, Sidik, *AS Penghambat Demokrasi*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001
- Kegley, Charles W, *American Foreign Policy: Pattern And Process*, St. Martin Press, New York, 1996
- Mas'oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasiona: ldisiplin dan metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Mas'oed, Mohtar, *Studi Hubungan Internasional: tingkat analisis dan teorisasi*, Pusat antar Universitas-studi sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989
- Muhammad, Ali, *Reading Brick Hubungan Internasional Kawasan ( Asia Pasifik)*

- McAuliff, John, *Artikel: Indochina vol 2*, Januari 1997
- Musa, Muhammad, *Hegemoni Barat terhadap Pencaturan Politik Dunia: Sebuah Potert Hubungan Internasional*, Wahyu Press, Jakarta, 2003
- Lake, David A, *American Foreign Policy in it's Century*, Princeton University Press, New Jersey, 1965
- Peele, Gillian dkk, *Developments in American Politics*, Macmillan Press LTD, London, 1998
- Spanier, John, *American Foreign Policy Since World War II*, SC Press, Washington DC, 1988
- Stone, Alan, *Governing the American Republic: Economic, Laws and Policies*, St. Martin Press, New York, 1985
- Suhindriyo, *Biografi Singkat presiden-presiden Amerika Serikat*, Yayasan Pustaka Nusatama, 1999
- VanDeveer, Stacy D, *Artikel: Environment and Security policy*, Harvard university, Januari, 1999
- Wanandi, Jusuf, *The Clinton Administration and The Pasific*, CSIS, 1994
- Wanandi, Jusuf, *Asia Pasific After The Cold War*, CSIS, Jakarta, 1996
- Watts, William, *Artikel: Converge Divergence in Political Interest, Values, and Policies*
- Wortzel, Larry M, *Artikel: Why The Administration Should Reaffirm the Six Insurance to Taiwan*, 16 Maret 2000
- Zweig, David, *Clinton and China: Creating Polici Agenda That Works*, 1993
- Artikel: United States: Government* (<http://Encarta.msn.com>)
- Artikel: Public Engagement in American Foreign Policy*, The Aspen Institute, 1995
- Jurnal Hubungan Internasional*, Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional edisi pertama vol 1, Februari 2004
- Jurnal Hubungan Internasional*, laboratorium ilmu Hubungan Internasional edisi pertama vol 2, Desember 2004

Sumber dari internet:

<http://www.defenselink.mil/pubs/easr98/>

<http://www.h-net.org/~hns/archives/2000/061500.a.html>

<http://www.usembassyjakarta.org>